

Abstrak

Belum optimalnya pemanfaatan peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan) di Politeknik Angkatan Darat (Poltekad), menyebabkan banyaknya produk belum disertifikasi. Identifikasi *stakeholder* diperlukan untuk mengetahui tingkat kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) para *stakeholder* untuk menjaga hubungan keterlibatan *stakeholder* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, melihat langsung di lapangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat 6 (enam) *stakeholder* yang terlibat kegiatan litbanghan di Poltekad, 2) Belum optimalnya peran pemegang Lapangan kekuasaan Teknis (LKT) yang merupakan institusi dengan kewenangan pada produk. Adapun saran yang didapat kami sampaikan adalah: 1) memaksimalkan peran Lapangan Kekuasaan Teknis dalam setiap tahap kegiatan Litbanghan, 2) Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang keterlibatan Lapangan kekuasaan Teknis.

Abstract

The non-optimal utilization of the role of *stakeholders* in Defense Research and Development (R&D) activities at the Army Polytechnic, has resulted in many products not being certified. Identification of *stakeholders* is needed to determine the level of power and interest of *stakeholders* to maintain the *stakeholder* involvement relationship. This research is a qualitative descriptive study with data collection techniques through interviews, direct viewing of the field and documents. The results of this study indicate that 1) There are 6 *stakeholders* involved in defence R&D activities at the Poltekad, 2) The role of the holder of the technical power which is an institution with authority over products is not yet optimal. The suggestions we get are: 1) maximizing the role of the Technical Authority Field in every stage of R & D activities, 2) There needs to be regulations governing the involvement of the Technical Authority Field.